



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
Tahun 2016**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini dapat terealisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran startegis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kineja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar laporan ini berisikan informasi mengenai rencana kinerja beserta pancapaian target dari sasaran strategis tahun 2016, termasuk pengukuran terhadap capaian indikator kinerja.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dan disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat.

Balikpapan, Pebruari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**



SUBIRMAN DJAYALEKSANA.

Pembina Tk. I

NIP. 196911101990031012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi,.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi,.....	1
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis),.....	2
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,.....	2
E. Struktur Organisasi,.....	14
F. Sumber Daya Manusia,.....	15
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	17
1. Visi,.....	17
2. Misi,.....	17
3. Tujuan,.....	18
4. Sasaran,.....	19
5. Indikator Kinerja,.....	19
6. Strategi,.....	20
7. Kebijakan,.....	20
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016,.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016,.....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	24
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	26
IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	
A. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.	
B. SK. Indikator Kinerja Utama (IKU).	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.	
D. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016.	
E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016.	
F. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016.	
G. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016.	
H. Realisasi dan Capaian Keuangan Tahun 2016.	
I. Realisasi Anggaran Tahun 2016.	
J. Tingkat Efisiensi dan Capaian/Penyerapan.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Balikpapan.

Dasar pembentukan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah.

B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran Kcbijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Program-program Rutin maupun Non Rutin Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2016 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
7. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
10. Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan.
11. Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota.
12. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas.
14. Program Peningkatan Pelayanan Laut.
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan.
16. Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika.
17. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas LLAJ.
18. Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan.
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi,
2. Tingkat kesadaran pengguna jalan yang masih rendah,
3. Angkutan barang yang melebihi tonase dan melintas di dalam kota,
4. Ruang parkir perkotaan,
5. Angkutan anak sekolah,
6. Sarana kelengkapan jalan yang kurang, dan
7. Kelayakan terminal penyeberangan Kampung Baru Tengah.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Adapun tugas dari masing-masing perangkat Dinas Perhubungan Kota

Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, meliputi : perhubungan darat, perhubungan laut, udara, dan pos telekomunikasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan pemberian layanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;

- f. pengelolaan manajemen bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- h. pembinaan teknis bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;

- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas;
 - g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bidang Perhubungan Darat
- a. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perhubungan darat meliputi manajemen dan *rekayasa lalu lintas*, manajemen angkutan dan terminal, sarana dan prasarana lalu lintas, *análisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas*, serta pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas.
 - b. Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- Bidang Perhubungan Darat membawahkan seksi yang dipimpin seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan penumpang dan barang;
- b. pelaksanaan pemberian layanan izin trayek angkutan kota, izin operasi angkutan yang melayani wilayah kota dan rekomendasi izin trayek/operasi angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. penentuan lokasi, pelaksanaan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan;
- d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta andalalin di jalan kota;
- e. pelaksanaan pembinaan sekolah mengemudi;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan;
- i. pelaksanaan pemberian layanan sertifikasi pengemudi angkutan umum dan barang;
- j. pelaksanaan pemberian layanan izin, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- k. pelaksanaan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi, bengkel umum kendaraan bermotor dan pengawasannya;

- l. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - m. pengoperasian fasilitas parkir di jalan;
 - n. pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang;
 - o. pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang lalu lintas, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - p. pelaksanaan pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor, parkir dan terminal;
 - q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi
- a. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan bidang kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan serta urusan perhubungan udara, pos telekomunikasi.
 - b. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
 - c. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bidang perhubungan laut, udara dan pos telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi dan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan umum, khusus, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi, pembangunan pelabuhan dan penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP serta DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, nasional, regional dan lokal;
- d. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat keselamatan (rambu-rambu), angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penerbitan izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
- f. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota serta izin pengerukan dan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan lokal, regional, nasional, dan internasional;
- g. pemberian izin pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota;
- h. pengawasan pelaksanaan tarif dan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan lintas kota;

- i. penetapan, pengawasan pelaksanaan tarif dan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dalam kota;
- j. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam wilayah kota;
- k. pelaksanaan pemberian layanan surat izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan surat izin operasi perusahaan non pelayaran serta surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) dalam kota;
- l. pemberian rekomendasi/izin di bidang perhubungan laut, udara, pos dan telekomunikasi;
- m. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, pengawasan, pemeriksaan penertiban surat persetujuan berlayar (SPB), sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan serta tanda kebangsaan;
- n. pelaksanaan pemberian layanan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- o. pelaksanaan pemberian layanan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota dan izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G).
- p. pemberian layanan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara;

- q. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penetiban bangunan tinggi;
 - r. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi penetapan lokasi dan pembangunan bandara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
 - s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan
- a. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan.
 - b. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
 - c. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang perhubungan;

- b. Penyusunan dan penetapan rencana jaringan umum transportasi jalan dan rencana umum lintas penyeberangan;
- c. Penyusunan usulan lokasi dan rancang bangun terminal penumpang dan barang;
- d. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
- e. Penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan jaringan lintas angkutan barang;
- f. Penyusunan rencana rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan andalalin;
- g. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelabuhan, terminal dan parkir umum;
- h. Pelaksanaan pengkajian pengembangan transportasi;
- i. Penyusunan kebijakan teknis penetapan tarif jasa terminal penumpang/barang, tarif penumpang angkutan/taxi dalam kota dan angkutan SDP dalam kota serta tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah kota;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan jaringan transportasi, pelabuhan, terminal, trayek angkutan, perlengkapan jalan dan fasilitas parkir umum di wilayah kota;
- k. Pengumpulan dan pengolahan data hasil survey dan kajian di bidang perhubungan darat, laut, udara dan postel;
- l. Penyediaan dan pemeliharaan dokumen/data/informasi dibidang perhubungan darat, laut, udara dan postel yang telah diolah;

- m. Pengoordinasian pengolahan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data, dan sistem informasi di bidang perhubungan darat, laut, udara dan postel;
- n. Pengkajian pengembangan sistem informasi dan pengendalian lalu lintas, jaringan transportasi dan trayek angkutan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- o. Penyusunan laporan periodik pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan darat, laut, udara dan postel;
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memberikan pelayanan uji kendaraan kepada masyarakat, membantu pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan pengguna kendaraan bermotor.

7. Unit Pelaksana Teknis Terminal.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Keberadaan terminal merupakan salah satu prasarana utama dalam pelayanan angkutan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah.

8. Unit Pelaksana Teknis Parkir

UPT Pengelola Parkir mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pengelolaan parkir.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah pada Pasal 21, Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan program perhubungan,
2. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemantauan dan analisa kelayakan sarana dan prasarana bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi,
3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan,
4. Pemberian layanan perizinan dan rekomendasi perizinan,
5. Evaluasi dan Pelaporan,
6. Tugas Lain.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kabid, 3 (tiga) Kasubbag, 8 (delapan) Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian Operasional
 - c. Seksi Prasarana, Teknik Sarana dan Angkutan

4. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel membawahi :
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lalu Lintas Angkutan Laut
 - c. Seksi Perhubungan Udara dan Postel
5. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan :
 - a. Seksi Rekayasa Jaringan Transportasi
 - b. Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
7. Unit Pelaksana Teknis Terminal
8. Unit Pelaksana Teknis Parkir
9. Kelompok Jabatan Fungsional untuk Penguji Kendaraan Bermotor.

F. Sumber Daya Manusia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana (S-2)	6
2	Pasca Sarjana (S-1)	12
3	Diploma (D-3)	5
4	Diploma (D-2)	4
5	SLTA	91
6	SLTP	19
7	SD	5
	Jumlah	142

Tabel Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

No.	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	Spamen	1
2	Spama	4
3	Adum/Adumla	15
	Jumlah	20

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV	8
2	III	17
3	II	103
4	I	14
	Jumlah	142

Tabel Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas (Eselon II B)	1
2	Sekretaris (Eselon III A)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III B)	3
4	Kasubbag/Kasie/Ka.UPT (Eselon IV A)	13
5	Kasubbag TU UPT (Eselon IV B)	3
6	Staf	121

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah ; “Terwujudnya Transportasi Yang Handal di Kota Balikpapan”, yang mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan kepada stakeholdernya yaitu perusahaan jasa angkutan dan masyarakat pada umumnya harus memenuhi keinginan dan tuntutan berupa pelayanan dan pengaturan pelayanan transportasi yang lancar, cepat dan nyaman.

2. Misi

Misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas pegawai,
- b. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi,
- c. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan,
- d. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

3. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan maupun visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi antara lain waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, dilakukan secara jelas, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

No.	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan kualitas pegawai.	Meningkatkan etos kerja dan kinerja pegawai yang optimal.
2	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.	Meningkatkan kelancaran transportasi di Kota Balikpapan.
3	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.	Menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.	Mewujudkan pelayanan angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur, untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dirumuskan sasaran sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.
- b. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.
- c. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.
- d. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

5. Indikator Kinerja

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja yang akan menjadi acuan kinerja dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

- a. Terwujudnya peningkatan pelayanan terminal penyeberangan Kp. Baru Tengah.
- b. Terwujudnya keselamatan pelayaran dalam perairan di Kota Balikpapan.
- c. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan.
- d. Tertib Angkutan Umum.
- e. Terwujudnya peningkatan pelayanan.
- f. Meningkatkan ketertiban Lalu lintas Kota Balikpapan.

- g. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.
- h. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.
- i. Pelayanan angkutan umum massal dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.

6. Strategi

Strategi dan kebijakan merupakan faktor penting penempatan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijaksanaan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

7. Kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki 8 (delapan) kebijakan, yaitu ;

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi.
- b. Meningkatkan keselamatan transportasi, dan pengamanan lalu lintas
- c. Meningkatkan keamanan transportasi, dengan kegiatan penyediaan perlengkapan/rambu jalan dan penyediaan ATCS.
- d. Penyediaan infrastruktur/pembangunan koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
- e. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi, dengan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas/transportasi.

- f. Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
- g. Meningkatkan pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan prasarana perhubungan.
- h. Mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ramah lingkungan.

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan sebanyak 19 (sembilan belas) program, yaitu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan .
7. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
10. Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan.
11. Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota.
12. Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
14. Program Peningkatan Pelayanan Laut.
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan.

16. Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika.
17. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas LLAJ.
18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan.
19. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, antara lain ;

1. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan/Ruang Tunggu.
2. Penyuluhan keselamatan laut.
3. Operasional, pemeliharaan kapal patroli dan perlengkapan Lalu Lintas Laut.
4. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
5. Penertiban angkutan kota.
6. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan.
7. Penyediaan Halte Angkutan Umum.
8. Pengawasan kawasan parkir.
9. Pengadaan sarana Lalu Lintas.
10. Pemeliharaan sarana dan fasilitas Lalu Lintas.
11. Pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum massal.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pada rencana kerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan beserta

anggaran yang dibutuhkan Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2016 ;

1. Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.
 - 1.1 Peningkatan sarana dan prasarana.
2. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.
 - 2.1 Peningkatan kelaikan pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.
 - 3.1 Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan.
 - 3.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
4. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.
 - 4.1 Peningkatan pelayanan angkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Dari 4 (enam) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.

Hasil kinerja dari sasaran Meningkatnya kemampuan dan disiplin pegawai. dengan indikator ;

- a. Terwujudnya peningkatan pelayanan terminal penyeberangan Kp. Baru Tengah menunjukkan angka 99%, adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebesar 100%.
- b. Terwujudnya keselamatan pelayaran dalam perairan di Kota Balikpapan menunjukkan angka 98%, adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebesar 90%.

2. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.

Hasil kinerja dari sasaran Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan dengan indikator ;

- a. Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan menunjukkan angka 96%, adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebesar 83%.
- b. Tertib Angkutan Umum menunjukkan angka 0% (nihil), adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebesar 80%.

3. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.

Hasil capaian kinerja pada sasaran Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan pelayanan menunjukkan angka sebesar 100%. adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebanyak 90%.
- b. Meningkatkan ketertiban Lalu lintas Kota Balikpapan.menunjukkan angka sebesar 0%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebanyak 100% .
- c. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas dengan indikator kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ menunjukkan angka sebesar 84%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebanyak 90% .
- d. Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas dengan indikator kegiatan Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan menunjukkan angka sebesar 64%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebanyak 90% .

4. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

Hasil capaian kinerja dari sasaran Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum. dengan indikator Pelayanan angkutan umum massal dan terpeliharanya

fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya menunjukkan angka sebesar 99%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebanyak 90%

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel (terlampir). Dari data tabel terlampir dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam kaitannya terhadap akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan baik. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam hal pencapaian sasaran kinerja, yang dapat terlihat dari realisasi keuangan maupun fisik masing-masing indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2016 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

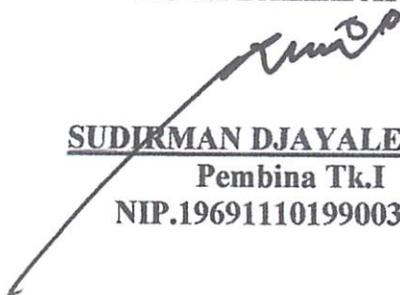
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, antara lain :

1. Perencanaan program yang disusun sesuai Visi, Misi dan RPJMD yang sudah ditetapkan di periode tahun 2011 – 2016.
2. Prinsip efektif, efisien dan ekonomis didalam program dan sasaran menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.

3. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran *strategis organisasi* dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasilguna.
4. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Demikian saran yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**

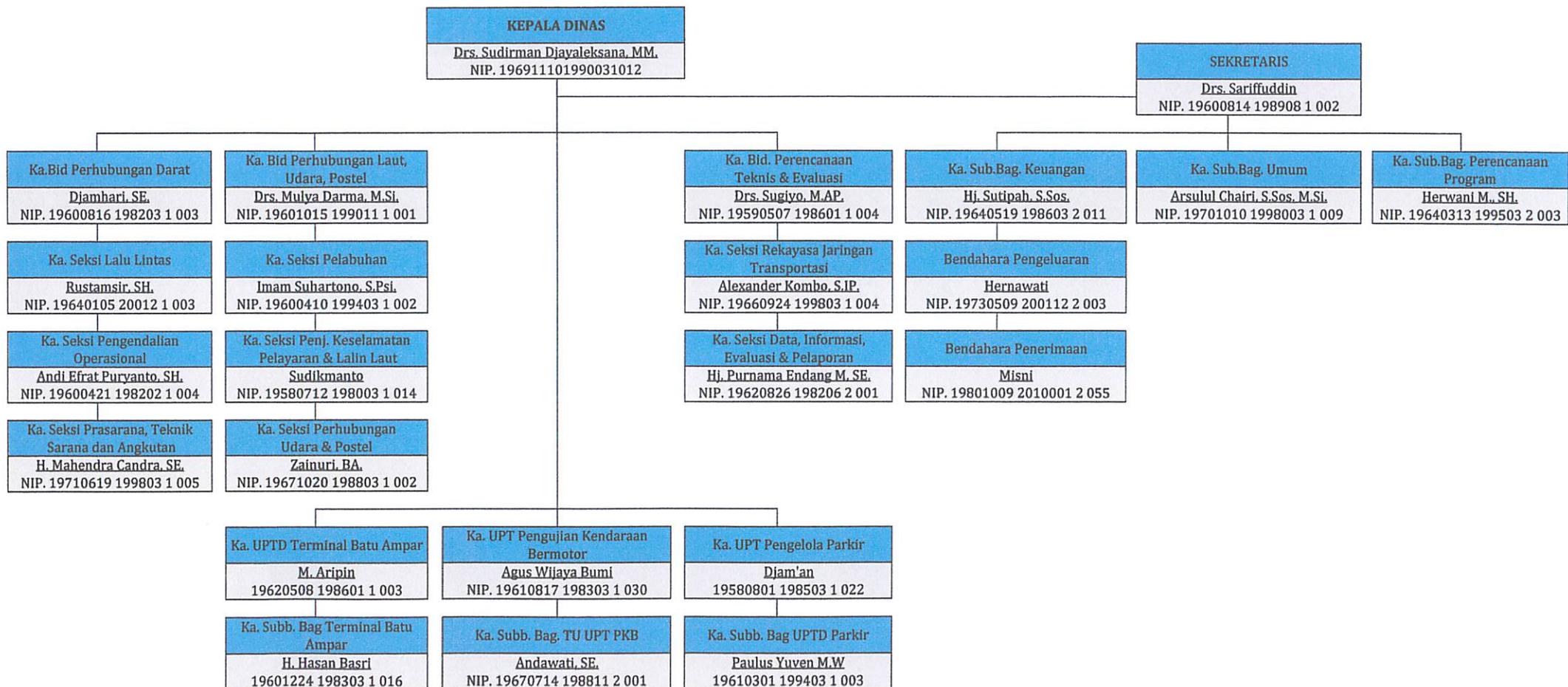


SUDIRMAN DJAYALEKSANA

Pembina Tk.I

NIP.196911101990031012

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I No.5 Telepon (0542) 87629, Fax.(0542) 876290 Balikpapan

Kode Pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 050.14/ ~~08~~ /2016

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011 - 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 - 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 - 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2997 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Januari 2016



Drs. BUDIRMAN DIAYALEKSANA, MM.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691110 199003 1 012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi
2.	Meningkatnya Ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas	1. Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas 2. Penurunan Pelanggaran Lalu lintas 3. Persentase Kendaraan yang Laik Jalan

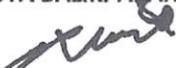
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 303.669.000	
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1.458.455.000	
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 934.550.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 307.390.000	
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 830.000.000	
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 2.927.000.000	
Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan	Rp 148.970.000	
Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	Rp 1.282.948.000	
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 2.718.672.000	
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 4.774.800.000	
Peningkatan Pelayanan Laut	Rp 646.218.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan	Rp 345.746.000	
Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika	Rp 90.000.000	
Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 300.000.000	
Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan	Rp 96.662.000	

WALIKOTA BALIKPAPAN



H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, Maret 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN


SUDIRMAN DJAYALEKSANA
NIP.196911101990031012

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	ANGGARAN TAHUN 2016	Target Setelah Perubahan	APBD-Perubahan Tahun 2016
1	Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut ; 1. Jumlah fasilitas Pelabuhan/ Ruang Tunggu 2. Jumlah pelaksanaan penyuluhan keselamatan laut 3. Jumlah sapras keselamatan/ Life Jacket	1 paket dokumen penelitian/ pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tanah 2 kali penyuluhan 1 unit body speed boat	Rp 169.782.000 Rp 49.125.000 Rp 597.093.000	1 paket dokumen penelitian/ pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tanah - 1 unit body speed boat	Rp 114.769.440 Rp - Rp 298.304.500
2	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi	Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan ; 1. Jumlah lokasi Terminal Angkutan Barang 2. Jumlah Halte Angkutan Umum 3. Jumlah fasilitas parkir khusus (gedung/taman parkir) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan 2. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas	4 paket dokumen perencanaan/ penelitian 5 halte 15 lokasi 1 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIL & ATCS, 2581 M ² marka jalan, 9411 M ² kerb & median, 1 paket ZoSS. 535 buah rambu Lalin, 22 buah waterblok, 31 unit blokade, 3 simpang ATCS	Rp 1.000.000.000 Rp 164.390.000 Rp 250.000.000 Rp 2.592.762.000 Rp 4.535.500.000	2 paket dokumen perencanaan/ penelitian 0 halte 15 lokasi 0 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIL & ATCS, 1000 M ² marka jalan, 2000 M ² kerb & median, 1 paket ZoSS. 270 buah rambu Lalin, 22 buah waterblok, 31 unit blokade, 1 simpang ATCS	Rp 489.085.600 Rp - Rp 1.100.000 Rp 970.475.000 Rp 1.533.505.780
3	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ; 1. Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan Peningkatan Pelayanan Angkutan ; 1. Menurunnya jumlah Angkutan Kota	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir) 1887 Angkot	Rp 1.292.000.000 Rp 132.948.000	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir) 1887 Angkot	Rp 870.638.152 Rp -
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum	Peningkatan Pelayanan Angkutan ; 1. Jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte	10 shelter	Rp 143.000.000	10 shelter (Penggantian Accu Buss SAUM)	Rp 157.238.000

PROGRAM

ANGGARAN (APBD-P TA. 2016)

KETERANGAN

1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 10.392.900
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 702.523.308
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 934.550.000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 307.390.000
5	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 157.238.000
6	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp 870.638.152
7	Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan	Rp 144.317.000
8	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	Rp 687.720.000
9	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 1.083.365.000
10	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 1.661.215.780
11	Peningkatan Pelayanan Laut	Rp 298.304.500
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan	Rp 236.193.940
13	Peningkatan dan Pengembangan POS, Telekomunikasi dan Informatika	Rp 35.360.000
14	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 267.585.000
15	Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan	Rp 91.378.300

Balikpapan, 09 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

SUDIRMAN DJAYALEKSANA
NIP. 196611101990031012

Wakil Wali Kota Balikpapan,

H.M. RIZAL EFFENDI



REVISI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SKPD				PERJANJIAN KINERJA ESELON III				PERJANJIAN KINERJA ESELON IV				
RENSTRA SKPD												
NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	TARGET	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET	Setelah APBD-P TA. 2016
1	Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.	1. Peningkatan sarana dan prasarana.	100%	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan.	~ Terwujudnya peningkatan pelayanan terminal penyeberangan Kp. Baru Tengah.	100%	1	Pengembangan Pelabuhan Kampung Baru Tengah	~ Dokumen penelitian/perencanaan pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah.	1 paket dokumen penelitian/ pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah	1 paket dokumen penelitian/ pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah
				2	Program Peningkatan Pelayanan Laut	~ Terwujudnya keselamatan pelayaran dalam perairan di Kota Balikpapan.	90%	1	Penyuluhan Keselamatan Laut.	~ Awak kapal (kapal klotok, speedboat, nelayan dan pemilik kapal <GT.7 di Kota Balikpapan)	2 kali penyuluhan	Nihil.
								2	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut.	~ Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan pengadaan mesin kapal speedboat.	2 unit mesin (1 body speedboat)	2 unit mesin (1 body speedboat)
2	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.	1 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor	83%	1	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	~ Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	83%	1	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	~ Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir)	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir)
				2	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota	~ Tertib Angkutan Umum	80%	1	Penertiban Angkutan Kota	~ Terlaksananya penertiban Angkutan Kota	1887 Angkot	Nihil.
3	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.	1.1 Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan.	100%	1	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan.	~ Terwujudnya peningkatan pelayanan	90%	1	Perencanaan pembangunan Depo Kontainer, pergudangan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.	~ Dokumen perencanaan/ penelitian	4 paket dokumen perencanaan/ penelitian	2 paket dokumen perencanaan/ penelitian
								2	Pembangunan halte Angkutan Kota.	~ Terbangunnya fasilitas prasarana Angkutan Kota	5 halte	Nihil.
				1	Unit Pengelola Teknis Parkir.	~ Kawasan parkir yang diamankan dan dikendalikan.	15 lokasi pengawasan.	Nihil.				
		1.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.	90%	1	Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	~ Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.	90%	1	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	~ Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	1 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIL & ATCS, 2581 M ² marka jalan, 9411 M ² kerb & median, 1 paket ZoSS.	0 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIL & ATCS, 1000 M ² marka jalan, 2000 M ² kerb & median, 1 paket ZoSS.
				2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas.	~ Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.	90%	1	Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	~ Alat-alat fasilitas Lalu lintas Jalan, alat pemantau Lalu lintas.	535 buah rambu Lalin, 22 buah waterblok, 31 unit blokade, 3 simpang ATCS	270 buah rambu Lalin, 22 buah waterblok, 31 unit blokade, 1 simpang ATCS
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.	1 Peningkatan pelayanan angkutan.	90%	1	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	~ Pelayanan angkutan umum massal dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya	90%	1.	Pemeliharaan prasarana Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	~ Jumlah pemeliharaan fasilitas dan prasarana Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	10 shelter.	10 shelter (Penggantian Accu Buss SAUM)

Balikpapan, 28 Nopember 2016
KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN



B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.	1. Peningkatan sarana dan prasarana.	prosentase	100%	99%	99%
2	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.	1 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor.	prosentase	83%	96%	116%
3	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.	1.1 Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan.	prosentase	100%	50%	50%
		1.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.	prosentase	90%	74%	82%
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.	1 Peningkatan pelayanan angkutan.	prosentase	100%	99%	99%

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan terminal penyeberangan Kp. Baru Tengah.	prosentase	100%	113.269.440	99%
2	Terwujudnya keselamatan pelayaran dalam perairan di Kota Balikpapan.	prosentase	90%	293.463.500	98%

Sasaran 2. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan.	prosentase	83%	837.354.648	96%
2	Tertib Angkutan Umum.	prosentase	80%	-	0%

Sasaran 3. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	1.1 Terwujudnya peningkatan pelayanan.	prosentase	90%	487.331.800	100%
	1.2 Meningkatkan ketertiban Lalu lintas Kota Balikpapan.	prosentase	100%	-	0%
2	2.1 Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.	prosentase	90%	816.562.450	84%
	2.2 Terwujudnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas.	prosentase	90%	976.264.760	64%

Sasaran 4. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan angkutan umum massal dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.	prosentase	90%	156.437.469	99%

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2015	Realisasi 2015	Realisasi 2016	% Capaian 2016
1	Dokumen penelitian/perencanaan pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah.	paket	100%	5 buku dokumen penelitian/ pembangunan jembatan kapal klotok pelabuhan Kp. Baru Tengah	1 paket dokumen penelitian/ pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah	100%
2	Awak kapal (kapal klotok, speedboat, nelayan dan pemilik kapal <GT.7 di Kota Balikpapan)	kali	95%	2 kali penyuluhan	2 kali penyuluhan	0%
3	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan pengadaan mesin kapal speedboat.	unit	100%	6 paket	2 unit mesin (1 body speedboat)	100%
4	Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan	unit	100%	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir)	58.000 unit (29.000 unit 2 kali uji/kir)	98,00%
5	Terlaksananya penertiban Angkutan Kota	unit	100%	40 kali	40 kali (1887 Angkot)	0%
6	Dokumen perencanaan/ penelitian pembangunan Depo Kontainer, pergudangan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.	paket	100%	1 paket dokumen perencanaan/ penelitian	4 paket dokumen perencanaan/ penelitian	100%
7	Terbangunnya fasilitas prasarana Angkutan Kota	bangunan	0%	-	5 halte	0%
8	Kawasan parkir yang diamankan dan dikendalikan.	lokasi	100%	Lokasi	15 lokasi pengawasan.	0%
9	Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	paket	100%	1 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIIL & ATCS, 3000 M ² marka jalan, 14677 M ² kerb & median.	1 paket taman Lalin, 100 buah rambu, alat APPIIL & ATCS, 2581 M ² marka jalan, 9411 M ² kerb & median, 1 paket ZoSS.	94,28%
10	Alat-alat fasilitas Lalu lintas Jalan, alat pemantau Lalu lintas.	paket	100%	97 buah rambu Lalin, 1 paket alat ATCS	535 buah rambu Lalin, 22 buah waterblok, 31 unit blokade, 3 simpang ATCS	86,66%
11	Jumlah pemeliharaan fasilitas dan prasarana Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	bangunan	95%	2 koridor, 4 buss	10 shelter. (pengadaan accu buss SAUM)	100%

*APBD-P TA. 2016

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target RPJMD/RENSTRA	
					2015	2016
1	Dokumen penelitian/perencanaan pengembangan pelabuhan Kp. Baru Tengah.	paket	193.345.800	113.269.440	200.000.000	169.782.000
2	Awak kapal (kapal klotok, speedboat, nelayan dan pemilik kapal <GT.7 di Kota Balikpapan)	kali	19.579.500	-	20.000.000	49.125.000
3	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan pengadaan mesin kapal speedboat.	unit	433.649.550	293.463.500	439.727.000	597.093.000
4	Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan	unit	1.112.436.882	837.354.648	1.340.000.000	1.292.000.000
5	Terlaksananya penertiban Angkutan Kota	kali	188.125.000	-	192.990.000	132.948.000
6	Dokumen perencanaan/ penelitian	paket	243.071.127	487.331.800	290.300.000	1.000.000.000
7	Terbangunnya fasilitas prasarana Angkutan Kota	bangunan	-	-	-	164.390.000
8	Kawasan parkir yang diamankan dan dikendalikan.	lokasi	56.777.000	-	58.530.000	250.000.000
9	Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	paket	3.012.536.400	816.562.450	3.337.800.000	2.592.762.000
10	Alat-alat fasilitas Lalu lintas Jalan, alat pemantau Lalu lintas.	paket	1.321.340.980	976.264.760	1.354.109.520	4.535.500.000
11	Jumlah pemeliharaan fasilitas dan prasarana Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).	bangunan	423.657.703	156.437.469	500.000.000	143.000.000

*APBD-P TA. 2016

~ Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

~ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

D. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Program APBD-P TA. 2016

Sasaran Strategis	Program	Anggaran APBD TA. 2016	Anggaran APBD-P TA. 2016	Realisasi	% Capaian
1 Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan.	169.782.000	114.769.440	113.269.440	99%
	2 Program Peningkatan Pelayanan Laut.	646.218.000	298.304.500	293.463.500	98%
2 Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.	1 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	1.292.000.000	870.638.152	837.354.648	96%
	2 Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota.	132.948.000	-	-	0%
3 Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.	1 Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan.	1.414.390.000	490.185.600	487.331.800	99%
	2 Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota.	7.128.262.000	2.503.980.780	1.792.827.210	72%
4 Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.	1 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	143.000.000	157.238.000	156.437.469	99%

E. Efisiensi dan Capaian

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
				Capaian/Penyerapan
1	Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi.	67%	99%	83%
2	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan.	99%	96%	98%
3	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi.	56%	62%	59%
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.	100%	99%	100%

~ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja